

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO DENGAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY*

RIYAN FADILAH PUTRA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO DENGAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY*

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

RIYAN FADILAH PUTRA
A031191048



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY

disusun dan diajukan oleh

RIYAN FADILAH PUTRA
A031191048

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Makassar, 5 Oktober 2023

Pembimbing I,



Dr. Sri Sundari, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660220 199412 2 001

Pembimbing II,



Prof. Dr. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19651127 199103 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY

disusun dan diajukan oleh

RIYAN FADILAH PUTRA

A031191048

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 5 Oktober 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sri Sundari, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	
2	Prof. Dr. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	
4	Drs. M Achyar Ibrahim, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Riyan Fadilah Putra
NIM : A031191048
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata I

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO DENGAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY*

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 25 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Riyan Fadilah Putra

PRAKATA

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti Yusran dan Fatmawati, saudara Aditya Ariawan dan Muh Risky Arinugrah, Saudari Alya Rianty Amaliah dan Qanayah Bintang Najwa, serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan doa selama ini.
2. Ibu Dr. Sri Sundari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. Nirwana, S.E., M.Si. Ak., CA., CRA., CRP selaku Pembimbing II atas waktu dan ketulusannya dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Kartini, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP selaku penguji peneliti dan Bapak Drs. M Achyar Ibrahim S.E., M.Si. Ak., CA selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Ibu/Bapak dosen, pegawai, dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan, pengalaman serta bantuan yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

6. Senat Mahasiswa, Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, serta 19NITE sebagai tempat bagi peneliti untuk mengembangkan diri dan berorganisasi.
7. Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo yang telah banyak membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian serta informasi-informasi lain yang dibutuhkan oleh peneliti.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan di Universitas Hasanuddin terlebih dalam proses penyusunan skripsi ini

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca. Terakhir, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, amin.

Makassar, 18 Juli 2023



Riyan Fadilah Putra

ABSTRAK

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Palopo Dengan Pendekatan *Value for money*

Analysis of the Financial Performance of the Palopo City Government with a Value for money Approach

Riyan Fadilah Putra
Sri Sundari
Nirwana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Palopo dengan menggunakan analisis *Value for money*. Data yang digunakan berupa laporan realisasi APBD Pemerintah Kota Palopo tahun 2019-2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio ekonomi mencapai 94,98%, 86,26%, dan 93,40% yang dimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo termasuk kategori ekonomis. Dalam analisis rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo selama tahun 2019-2021 adalah 97,15%, 97,37%, dan 99,88%. Hal ini berarti kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo dinilai efisien. Sedangkan dalam rasio efektivitas menunjukkan hasil dibawah 100% yaitu 97,88%, 99,98%, dan 97,81% yang artinya pada tahun 2019 hingga 2021 kinerja Pemerintah Kota Palopo tidak efektif.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, *Value for money*, Ekonomis, Efisien, Efektivitas

This study aims is to determine and analyze the financial performance of the government of Palopo City using Value for money analysis. The data used consists of the realization reports of the Palopo City local budget (APBD) for the years 2019-2021. The data analysis technique employed includes economic, efficiency, and effectiveness ratio analysis. The results of this study indicate that the economic ratio reached 94,98%, 86,26%, and 93,40%, categorizing the financial performance of the Palopo City government as economical. In the analysis of financial efficiency ratios for the Palopo City government during the years 2019-2021, the values were 97,15%, 97,37%, and 99,88%. This suggests that the financial performance of the Palopo City government is considered efficient. However, in terms of effectiveness ratios, the results are below 100%, specifically 97,88%, 99,98%, and 97,81%. This implies that from 2019 to 2021, the performance of the Palopo City government was not effective.

Keywords: Financial Performance, Value for money, Economy, Efficiency, Effectiveness

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	11
2.1.1 Kinerja	11
2.1.2 Kinerja Keuangan	14
2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	15
2.1.4 Konsep <i>Value for money</i>	16
2.2 Penelitian Terdahulu	22
2.3 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Rancangan Penelitian	26
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Metode Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kota Palopo	32
4.1.2 Visi dan Misi Kota Palopo	33
4.2 Hasil Analisis <i>Value for money</i>	34
4.2.1 Rasio Ekonomis.....	35
4.2.2 Rasio Efisiensi	38
4.2.3 Rasio Efektivitas	42
BAB V PENUTUP	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	52

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo 2019 - 2021	6
1.2 Belanja Daerah Kota Palopo 2019 – 2021	7
3.1 Kriteria Ekonomi.....	29
3.2 Kriteria Efisiensi	30
3.3 Kriteria Efektivitas	31
4.1 Kriteria Ekonomis	35
4.2 Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Palopo 2019-2021	35
4.3 Kriteria Efisiensi	39
4.4 Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Palopo 2019-2021	39
4.5 Kriteria Efektivitas	42
4.6 Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Palopo 2019-2021	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
4.2 Grafik Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Palopo 2019-2021	37
4.3 Grafik Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Palopo 2019 – 2021	41
4.4 Grafik Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Palopo 2019 – 2021	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata	53
2. Surat Keterangan Telah Meneliti	54
3. Laporan Realisasi Anggaran	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sentralisasi wewenang dan kendali finansial negara pada periode sebelum zaman reformasi telah memberikan banyak wawasan bagi penduduk lokal mengenai disparitas dalam alokasi manfaat dan pemanfaatan sumber daya alam antara wilayah setempat dan Jakarta. Fenomena ini menyebabkan gejolak di berbagai daerah yang mendorong tuntutan untuk menerapkan otonomi istimewa atau bahkan meraih kemerdekaan dari NKRI sebagai hasil dari perasaan ketidakpuasan tersebut.

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk mengatur daerahnya secara mandiri. Hal ini terlihat dari adanya pembagian kewenangan yang tertera didalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah memungkinkan daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan dengan lebih mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi hingga pertanggungjawabannya, tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pusat.

Tidak hanya itu, sebagai akibat dari prinsip negara berdasarkan hukum dan sistem demokrasi, maka Pemerintah Daerah di Indonesia diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, baik kepada Pemerintah Pusat maupun kepada DPRD dan rakyat secara langsung. Struktur pemerintahan dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga penting untuk mempertanggungjawabkannya kepada publik (Hughes Owen 1992). Mencapai tujuan Tata Pemerintahan yang kokoh, bertanggungjawab, serta efisien dan efektif melalui menjaga interaksi yang sinergis

di antara sektor-sektor negara, swasta, dan masyarakat adalah sasaran dari Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) (Kurniawan 2005: 12).

Sebagai unsur dari suatu Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), salah satu permasalahan yang signifikan adalah kekurangan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99 seperti yang dijelaskan oleh Sitompul (2003), akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menjelaskan kinerja dan tindakan individu/entitas hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang berhak/berwenang untuk meminta klarifikasi atau pertanggungjawaban.

Dalam konteks organisasi publik, konsep kinerja merujuk pada ukuran prestasi atau hasil dalam mengelola dan menjalankan suatu organisasi, yang melibatkan semua tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Menurut Mardiasmo (2010), penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah, alokasi sumber daya, pengambilan keputusan, serta untuk mencapai pertanggungjawaban organisasi publik dan meningkatkan komunikasi internal di dalam lembaga tersebut.

Dalam persepsi masyarakat, sering kali organisasi sektor publik diberi penilaian buruk sebagai tempat yang tidak efisien, boros, dan mudah terjadi kebocoran dana. Sebagai hasilnya, terjadi peningkatan permintaan untuk memperbaiki kinerja organisasi publik dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah.

Evaluasi kinerja organisasi publik memiliki signifikansi yang penting karena berfungsi sebagai landasan untuk meningkatkan performa organisasi ke arah yang lebih optimal di masa mendatang (Kurniawan, 2011). Analisis kinerja merupakan suatu proses yang sangat penting dalam mengevaluasi kemajuan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi. Proses ini dilakukan untuk membantu organisasi mencapai misinya dengan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilakukan.

Analisis kinerja dapat digunakan dalam menilai tingkat akuntabilitas organisasi dan manajer dalam mencapai pelayanan publik yang lebih baik. Analisis kinerja dilakukan dengan melakukan prosedur pencatatan dan pengukuran terhadap pencapaian dari pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian tujuan. Dalam hal ini, hasil-hasil yang dihasilkan berupa produk, jasa, maupun proses.

Dalam konteks pemerintah daerah, kinerja keuangan suatu daerah bisa dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis kinerja keuangan pemerintah untuk menjelaskan bagaimana kualitas kinerja keuangan yang terdapat di daerah pemerintahan (Juwita, 2016:609).

Pada sektor publik, pengukuran kinerja seringkali sulit dilakukan karena tidak ada teknik atau tindakan baku yang dapat digunakan. Oleh karena itu, konsep *value for money* muncul sebagai salah satu cara untuk mengukur kinerja sektor publik. *Value for money* adalah indikator untuk melihat apakah anggaran yang telah dibelanjakan oleh sektor publik menghasilkan nilai yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

Dalam konsep *value for money*, terdapat tiga jenis indikator yang saling terkait, yaitu indikator *input*, *output*, dan *outcome*. Mardiasmo (2002) menjelaskan Analisis kinerja keuangan dengan pendekatan *value for money* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio, seperti rasio ekonomis, efektivitas, dan rasio efisiensi. Rasio ekonomis berkaitan dengan kemampuan organisasi sektor publik untuk meminimalkan pengeluaran yang boros dan tidak produktif, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan *input resources* yang digunakan. Rasio efisiensi, pada sisi yang berbeda, mengacu pada perbandingan antara keluaran (*output*) dan

masukan (*input*) yang terkait dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil keluaran mencapai tingkat maksimal dengan penggunaan masukan yang minimal, hal ini mencerminkan tingkat efisiensi yang tinggi. Sedangkan efektivitas berhubungan dengan tingkat pencapaian hasil program (*outcome*) dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan mengimplementasikan konsep *value for money*, diharapkan sektor publik dapat melakukan pengukuran kinerja yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa masyarakat memiliki tujuan untuk memastikan pelaksanaan *value for money* yang ekonomis, efisien, dan efektif dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Tujuan tersebut diartikan sebagai upaya untuk menghemat penggunaan sumber daya, memaksimalkan hasil yang dihasilkan, dan mencapai tujuan secara efektif.

Penelitian Dwi (2017) yang berjudul Konsep *Value for money* dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya terlihat efisien dari segi ekonomi, di mana 91,6% anggaran telah digunakan untuk penyediaan barang dan jasa. Selain itu, pemanfaatan anggaran untuk intensifikasi dan ekstensibilitas pajak daerah sebesar 86,45% menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah juga cukup tinggi dengan pencapaian pajak daerah yang melebihi 100% sebesar 102,22%.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gabriela *et al.* (2019) dengan judul Penerapan Metode *Value for money* sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan pada Organisasi Sektor Publik di Dinas Kesehatan Kota Manado menunjukkan program-program yang berkaitan dengan perbekalan kesehatan, pengadaan, peningkatan puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan adalah

ekonomis dan efisien. Namun, salah satu program tidak efektif, menunjukkan perlunya Dinas Kesehatan lebih fokus pada hasil programnya dan menilai kebermanfaatannya bagi masyarakat

Dalam pencapaian kinerja keuangan yang optimal, pemerintah Kota Palopo memiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertugas untuk mengelola keuangan, penatausahaan keuangan, dan aset daerah secara profesional dan berkualitas. Visi organisasi BPKAD adalah "terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional dan berkualitas," dengan tiga misi utama, yaitu meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia, memperbaiki mutu sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta meningkatkan tingkat profesionalisme dalam layanan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.

Melalui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palopo, terutama dengan adanya BPKAD yang profesional dan berkualitas, diharapkan dapat terus mempertahankan kinerja keuangan yang baik dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Dengan begitu, dapat tercipta pembangunan daerah yang optimal dan sesuai dengan potensi keuangan daerah masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk memperhatikan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan baik, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari badan pemeriksa keuangan.

Pemerintah Kota Palopo merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang telah menerima opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sejak tahun 2016 hingga 2022. Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas kinerja keuangan pemerintah daerah yang telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo 2019 - 2021

Pendapatan	2019	2020	2021
(PAD)	Rp 165.664.354.780,08	Rp 177.205.052.456,65	Rp 140.133.041.613,17
Pajak daerah	Rp 34.860.944.165,02	Rp 34.031.809.461,00	Rp 35.622.582.580,00
Retribusi daerah	Rp 9.074.168.785,55	Rp 8.880.154.097,48	Rp 11.587.793.535,64
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah	Rp 7.496.932.396,00	Rp 6.801.973.147,00	Rp 7.799.016.092,00
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp 114.232.309.433,51	Rp 127.491.115.751,17	Rp 85.123.649.405,53

Sumber : BPKAD Kota Palopo

Dari data laporan realisasi anggaran, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo tahun 2020 mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 6,97% namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 20,92%. Peningkatan maupun penurunan yang terjadi pada tingkat pendapatan asli daerah dapat menjadi salah satu acuan dalam melihat kinerja pemerintah Kota Palopo dalam pengelolaan anggaran apabila dilihat dari faktor ekonomi, efisiensi, maupun efektivitas. Namun selain itu juga terdapat hal yang perlu diperhatikan seperti contoh permasalahan yang terjadi dalam rapat pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKP) wali Kota Palopo, tahun anggaran 2021 membahas mengenai permasalahan terkait progres sejumlah proyek yang tidak sampai 100% salah satunya pembangunan kantor DPRD Palopo dimana anggaran tersebut sudah terserap 100% namun kegiatan proyek tersebut belum selesai dan masih berlanjut hingga tahun 2022. Selain itu juga terdapat proyek revitalisasi kawasan Islamic Centre turut dipertanyakan dimana dinilai tidak sesuai dalam perencanaan dan fakta yang terjadi. Anggaran yang digunakan untuk membenahi melanjutkan pembangunan dari bangunan yang sudah ada di dalamnya justru ini malah digunakan untuk membangun bangunan baru, yakni sekolah. Terkait proyek revitalisasi *Islamic Centre* ini, pihak tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Palopo tidak dapat memberi penjelasan terkait pelaksanaan revitalisasi ini.

Tabel 1.2 Belanja Daerah Kota Palopo 2019 – 2021

Belanja	2019	2020	2021
Belanja daerah	Rp 956.451.857.030,35	Rp 943,885,796,203,19	Rp 935,475,348,254,12
Belanja operasi	Rp 757.838.851.527,94	Rp 727.073.776.201,30	Rp 728,746,015,160,19
Belanja modal	Rp 198.613.005.502,41	Rp 207,967,903,780,89	Rp 206,729,333,093,93
Belanja tak terduga	Rp	Rp 8,844,116,221,00	Rp -
Belanja transfer	Rp -	Rp -	Rp -

Sumber : BPKAD Kota Palopo

Dari data yang diperoleh, tingkat persentase dari total belanja daerah Kota Palopo tahun 2021 mencapai 93,40%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah telah memenuhi standar. Namun dengan tingkat penurunan belanja sebesar 0,89% tidak sebanding dengan jumlah penurunan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian Andi Marwah (2022) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Sebelum dan Setelah Kebijakan Refocusing Anggaran mengungkapkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo terbilang rendah berdasarkan rasio kemandirian dan belanja modal mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar persentase dana yang dialokasikan pada belanja modal, semakin besar pula dana yang dapat digunakan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Sementara itu, hasil penelitian Irmayanti (2022) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kantor BPKAD Kota Palopo) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Keduanya juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kantor BPKAD Kota Palopo.

Dari fenomena yang terjadi pada pemerintah kota Palopo, ketidakjelasan terkait pengalihan anggaran yang dilakukan dapat berpotensi menyebabkan

realisasi penggunaan anggaran tidak dapat mencapai target yang ditetapkan sehingga pertanggungjawaban penggunaan dana yang ekonomis, efektif dan efisien memungkinkan tidak tercapai. Berdasarkan penjelasan tersebut, merupakan suatu hal menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh dan mengangkat judul penelitian analisis kinerja keuangan pemerintah Kota Palopo dengan pendekatan *value for money*.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo tahun 2019-2021 apabila diukur dengan pendekatan *value for money* ditinjau dari rasio ekonomi?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo tahun 2019-2021 apabila diukur dengan pendekatan *value for money* ditinjau dari rasio efektivitas?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo tahun 2019-2021 apabila diukur dengan pendekatan *value for money* ditinjau dari rasio efisiensi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo apabila diukur dengan pendekatan *value for money* dari rasio ekonomi tahun 2019-2021.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo apabila diukur dengan pendekatan *value for money* dari rasio efektivitas tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo apabila diukur dengan pendekatan *value for money* dari rasio efisiensi tahun 2019-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumber referensi yang berharga, sebagai bahan pembanding untuk memperluas pengetahuan, dan juga memberikan pandangan baru mengenai analisis kinerja keuangan dengan pendekatan *value for money*.

1.4.2. Kegunaan Bagi Instansi

Dapat memberikan masukan kepada badan pengelola keuangan dan aset daerah untuk meningkatkan potensi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

1.4.3. Kegunaan Untuk Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi peneliti di masa depan yang tertarik dalam mempelajari kinerja organisasi sektor publik dan dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari selama kuliah sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini mengulas terkait latar belakang penelitian terkait analisis kinerja keuangan dengan pendekatan *value for money* yang didalamnya juga terdapat rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini mengulas tentang tinjauan pustaka, yang berisi tinjauan teori dan konsep, penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini mengulas terkait konsep penelitian, populasi serta sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi operasional dan metode analisis data yang hendak dipakai.

Bab IV Hasil Dan Analisis

Bab ini menerangkan terkait gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan.

Bab V Penutup

Bab ini menerangkan terkait kesimpulan hasil penelitian serta saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Kinerja

a. Konsep Kinerja

Kinerja (performance) dapat didefinisikan sebagai tingkat prestasi atau hasil yang nyata, diukur secara berkala dalam hal kualitas dan kuantitas, berdasarkan pada sasaran, standar, dan kriteria yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai hasil dari tugas dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan atau organisasi, Effendi (2008).

Kinerja merupakan hasil dari penerapan pekerjaan atau aktivitas oleh individu di dalam suatu entitas organisasi, terpengaruh oleh beragam faktor, yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja mencakup pencapaian individu, kelompok, atau unit organisasi dalam merealisasikan tujuan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan sikap atau perilaku yang diinginkan. Dari berbagai definisi tentang kinerja yang telah dijelaskan di atas, intinya adalah bahwa kinerja menekankan pada hasil yang dihasilkan (*output*) atau dampak yang dihasilkan (*outcome*) dari berbagai fungsi pekerjaan melalui proses pengelolaan *input*.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merujuk pada proses pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan program yang sedang berjalan dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja yang diukur dapat difokuskan pada jenis atau level program yang sedang dijalankan (proses), hasil atau produk yang dihasilkan (*output*), atau dampak dan hasil dari produk atau layanan yang dicapai (*outcome*).

Program dapat mencakup berbagai aktivitas, proyek, fungsi, atau kebijakan yang memiliki tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Yuwono (2008), pengukuran kinerja merujuk pada proses merekam dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan yang bertujuan mencapai misi, yang tercermin dalam hasil yang ditampilkan dalam bentuk produk, layanan, atau proses. Sebaliknya, Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja mengacu pada evaluasi kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas barang atau layanan, serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Adiputri (2013) juga mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja merujuk pada proses penilaian terhadap perkembangan pekerjaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, mencakup informasi terkait efisiensi penggunaan sumber daya, kualitas produk dan layanan, pencapaian hasil dibandingkan dengan tujuan yang diinginkan, serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan tersebut.

Pengukuran kinerja memiliki peran penting dalam mengevaluasi prestasi manajer dan unit organisasi yang mereka pimpin. Ini juga berkontribusi pada akuntabilitas organisasi dan manajer dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas melampaui sekadar kemampuan untuk menghasilkan laporan tentang pengeluaran uang publik; melainkan juga melibatkan kemampuan untuk menunjukkan bahwa dana publik telah digunakan dengan cara yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Mardiasmo (2009) menguraikan beberapa keunggulan pengukuran kinerja dalam sektor publik:

- a) Memberikan Konsep tentang Dimensi Penilaian Manajemen Kinerja: Pengukuran kinerja memberikan panduan tentang parameter yang digunakan untuk menilai performa manajemen.
- b) Memberikan Panduan untuk Mencapai Sasaran Kinerja: Pengukuran kinerja memberikan arahan dan sasaran yang jelas untuk meraih target kinerja yang telah ditentukan.
- c) Pemantauan, Evaluasi, dan Koreksi Kinerja: Pengukuran kinerja memungkinkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja. Ini memungkinkan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan dan memberikan landasan untuk tindakan perbaikan.
- d) Dasar untuk Penghargaan dan Sanksi yang Objektif: Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar objektif untuk memberikan penghargaan dan sanksi berdasarkan pencapaian prestasi sesuai dengan sistem yang telah disetujui.
- e) Fasilitator Komunikasi antara Anggota Tim dan Pimpinan: Pengukuran kinerja berperan sebagai alat komunikasi yang membantu meningkatkan kinerja organisasi melalui interaksi antara anggota tim dan pimpinan.
- f) Identifikasi Kepuasan Pelanggan: Pengukuran kinerja membantu mengidentifikasi sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan telah terpenuhi.
- g) Memahami Proses Kegiatan Institusi Pemerintah: Pengukuran kinerja membantu memahami proses kegiatan yang dilakukan oleh institusi pemerintah.
- h) Pengambilan Keputusan yang Berdasarkan Fakta: Pengukuran kinerja memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan data dan fakta yang objektif.

Sistem pengukuran kinerja dalam sektor publik bertujuan untuk membantu manajer dalam menilai pencapaian strategi melalui pengukuran, baik finansial maupun non-finansial. Sistem ini juga berfungsi sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat melalui implementasi sistem *reward and punishment*.

2.1.2 Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menjadi isu yang sangat signifikan untuk diperiksa dalam lingkungan organisasi sektor publik, termasuk dalam lingkungan pemerintah. Sejak diperkenalkannya pendekatan anggaran berdasarkan kinerja, semua entitas pemerintah diharapkan mampu mencapai pencapaian optimal dalam kinerja keuangan.

Tuntutan untuk menjalankan akuntabilitas publik semakin meningkat dalam lingkungan organisasi sektor publik, termasuk pemerintah pusat dan daerah, unit-unit pemerintah, departemen, serta lembaga negara. Dengan melakukan ini, diharapkan dapat mengurangi pemborosan, penyalahgunaan dana, serta mengidentifikasi program-program yang tidak efisien. Sesuai dengan IAI (2007), kinerja keuangan melibatkan kapabilitas perusahaan atau organisasi dalam mengelola dan mengawasi sumber daya yang dimilikinya. Kinerja keuangan mencerminkan situasi finansial organisasi berdasarkan tujuan, standar, dan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perusahaan melakukan upaya formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas aktivitas yang dilakukan pada periode tertentu dalam bentuk kinerja perusahaan. Salah satu indikator kinerja perusahaan yang paling umum digunakan adalah kinerja keuangan, yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba.

Wiratna (2017) menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dijalankan, yang melibatkan perbandingan antara hasil pekerjaan tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena alasan ini, penilaian dan pengukuran yang dilakukan secara berkala terhadap setiap pekerjaan memiliki kepentingan yang besar bagi perusahaan.

Pengukuran kinerja digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi aktivitas operasionalnya, agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Analisis kinerja keuangan adalah suatu langkah penting dalam mengkaji data, menghitung, mengukur, mengartikan, dan memberikan solusi terhadap kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu.

b. Laporan Kinerja

Laporan kinerja adalah laporan yang menggambarkan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan baik pada tingkat individu maupun perusahaan, dengan fokus pada penggunaan anggaran. Laporan kinerja bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengeluaran anggaran telah dilakukan secara efisien dan memberikan manfaat dalam aktivitas operasional perusahaan. Laporan ini juga membantu manajemen dalam menjalankan pengendalian internal dengan lebih efektif.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan keuangan daerah merujuk pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan lokal untuk membiayai keperluan rumah tangga daerahnya sendiri, terutama melalui pendapatan asli daerah (Rohman, *et all*, 2018). Pendapatan daerah dianggap sebagai peningkatan pada nilai kekayaan bersih selama tahun yang relevan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Semakin besar pendapatan asli suatu daerah, semakin besar kapasitas pemerintah daerah dalam mengurus aspek keuangan. Tingkat kemampuan

pemerintah daerah dalam mengelola aspek keuangan ini mungkin menjadi faktor signifikan dalam mengukur pencapaian pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kemampuan keuangan daerah memainkan peran penting dalam menentukan peringkat dan status kinerja pemerintahan daerah.

Namun, pengukuran kinerja pemerintahan tidak hanya berdasarkan pada hasil akhir yang diperoleh, tetapi juga melibatkan evaluasi masukan, keluaran, dan hasil secara komprehensif. Untuk memastikan target pencapaian anggaran, baik pendapatan maupun pengeluaran daerah, tercapai, penting untuk melakukan pemantauan berkala dengan membandingkan hasil pencapaian dengan target anggaran, serta mempertimbangkan tingkat pencapaian dalam persentase terhadap target tahun sebelumnya.

2.1.4 Konsep *Value for money*

a. Pengertian *Value for money*

Value for money (VFM) diadopsi sebagai standar dalam anggaran untuk organisasi sektor publik, berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja yang berfokus pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Menurut Mahmudi (2015), VFM dalam konteks organisasi sektor publik dapat diartikan sebagai konsep yang menghargai nilai uang dan digunakan sebagai alat pengukuran kinerja untuk mengevaluasi kinerja keuangan berdasarkan dimensi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dari aktivitas, program, dan organisasi.. Pendekatan VFM yang dijelaskan oleh Nao dalam Treasury (2004) terdiri dari empat pilar utama:

- **Pilar Ekonomi:** Ini berkaitan dengan pengurangan biaya *input* atau sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan.

- Pilar Efisiensi: Pilar ini melibatkan pencocokan antara *output* atau hasil dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkannya, dengan memastikan penggunaan anggaran yang optimal.
- Pilar Efektivitas: Ini berfokus pada pencocokan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai dari pengeluaran yang dilakukan, untuk memastikan pencapaian tujuan secara akurat.
- Pilar Keadilan: Pilar terakhir ini memastikan bahwa layanan pemerintah tersedia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga tidak ada diskriminasi dalam penyediaan pelayanan.

Secara keseluruhan, konsep VFM menggabungkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran publik memberikan nilai maksimal dan manfaat bagi masyarakat.

b. Pengukuran Kinerja *Value for money*

Mardiasmo (2011) menguraikan bahwa konsep "*Value for money*" adalah prinsip-prinsip fundamental dalam manajemen organisasi sektor publik yang terkait dengan tiga elemen utama:

1. Ekonomi

. Aspek ekonomi berhubungan dengan relasi antara pasar dan *input* (biaya *input*). Secara mendasar, ekonomi merujuk pada tindakan membeli barang dan jasa *input* dengan kualitas tertentu dengan harga yang paling efisien. Dalam lingkup organisasi pemerintah, ukuran ekonomi diterjemahkan sebagai sejauh mana alokasi anggaran untuk mendukung suatu kegiatan khusus.

Seperti yang diuraikan oleh Mahmudi (2013:83-84), aspek ekonomi melibatkan transformasi sumber daya finansial menjadi *input* sekunder seperti tenaga kerja, bahan baku, infrastruktur, dan modal yang digunakan dalam aktivitas operasional organisasi. Konsep ekonomi sangat terfokus pada biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh unit *input* tersebut. Secara lain, perolehan sumber daya *input* harus dilakukan dengan biaya rendah yang mendekati atau sejalan dengan harga pasar. Secara sistematis, ekonomi dapat diartikan sebagai perbandingan antara *input* yang diperoleh dan nilai moneter yang dikeluarkan untuk mendapatkan *input* tersebut. Tingkat ekonomi dapat diukur dengan membandingkan anggaran belanja dengan realisasi belanja serta tingkat pencapaian anggaran dalam bentuk persentase.

Konsep ekonomi dalam konteks "*Value for money*" menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan *input* atau sumber daya dikelola dengan bijak dan sesuai dengan nilai yang diharapkan, sehingga hasil yang dicapai memiliki kualitas dan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100 \%$$

2. Efisiensi

Efisiensi merujuk pada perbandingan antara hasil (*output*) atau produk yang dihasilkan dengan *input* atau masukan yang digunakan, dengan membandingkannya terhadap standar atau target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, suatu proses atau aktivitas operasional dianggap efisien apabila mampu mencapai produk atau pekerjaan tertentu dengan pemanfaatan sumber daya dan dana yang minimal. Artinya, efisiensi mengukur sejauh mana organisasi atau program dapat menghasilkan hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal.

Namun, penting untuk diingat bahwa indikator efisiensi dan efektivitas perlu digunakan bersama-sama. Suatu program yang dijalankan secara hemat dan efisien belum tentu mampu menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan yang

diinginkan. Di sisi lain, program yang efektif dalam mencapai sasaran mungkin tidak selalu efisien dalam pemanfaatan sumber daya. Jika suatu program berhasil dalam hal efektivitas dan efisiensi, maka program tersebut dapat disebut sebagai "*cost effectiveness*" atau keefektifan biaya.

Pengukuran efektivitas biaya melibatkan penggabungan informasi tentang efisiensi dan efektivitas, dan memberikan penilaian terhadap kinerja keseluruhan yang terkait dengan pelayanan dalam sektor publik. Dengan kata lain, efektivitas biaya menilai apakah hasil yang dicapai sebanding dengan sumber daya yang telah digunakan. Pemahaman yang baik tentang efisiensi dan efektivitas membantu pemerintah dan organisasi sektor publik untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai tujuan secara lebih baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100 \%$$

3. Efektivitas

Mahmudi (2013:86) menjelaskan bahwa efektivitas melibatkan perbandingan antara hasil yang diantisipasi dengan hasil aktual yang tercapai. Efektivitas juga dapat dilihat dari hubungan antara "*outcome*" (hasil akhir) dan "*output*" (hasil yang dihasilkan dari proses atau aktivitas). Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau aktivitas tersebut dianggap. Jika ekonomi menitikberatkan pada *input*, dan efisiensi berkaitan dengan *output* atau proses, maka efektivitas lebih menyoroti hasil atau "*outcome*."

Perlu dicatat bahwa organisasi, program, atau aktivitas akan dianggap efektif jika *output* yang dihasilkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (dikenal juga sebagai prinsip "*Spending wisely*" atau "Menggunakan anggaran secara bijaksana"). Tingkat efektivitas bisa diukur dengan membandingkan

pendapatan yang sebenarnya dengan anggaran yang telah dialokasikan, serta menghitung persentase pencapaian yang dicapai.

Secara keseluruhan, efektivitas menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai melalui hasil yang dihasilkan. Ini berfokus pada dampak atau outcome dari suatu program atau kegiatan, dan mengukur seberapa baik program tersebut menghasilkan hasil yang diinginkan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100 \%$$

Dari penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, dapat dirangkum bahwa tiga indikator utama dalam konsep *Value for money* memiliki hubungan yang saling terkait. Pertama, ekonomi membahas aspek *input* dengan fokus pada pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu dengan harga terbaik (*spending less*). Kedua, efisiensi membahas *input* dan *output*, menekankan pencapaian *output* tertentu dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin (*spending well*). Ketiga, efektivitas membahas *output* dan dampak, mengevaluasi sejauh mana *output* berkontribusi pada pencapaian tujuan dan dampak yang diharapkan (*spending wisely*).

Indikator *Value for money* dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas layanan (efektivitas). Ekonomi melibatkan proses pembelian *input* dengan kualitas optimal dengan biaya minimal, sementara efisiensi fokus pada penggunaan efektif sumber daya untuk menghasilkan *output*. Di sisi lain, efektivitas menilai sejauh mana *output* mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan.

Kesimpulannya, tiga indikator kinerja dalam organisasi sektor publik dapat dijabarkan sebagai berikut: ekonomi membahas mengenai *input*, efisiensi

membahas mengenai *input* dan *output*, dan efektivitas membahas mengenai *output* dan dampak. Dengan memahami keterkaitan antara ketiga aspek ini, organisasi dapat lebih holistik dalam menilai kinerjanya dalam konteks *Value for money*.

c. Manfaat *Value for money* Pada Sektor Publik

Penerapan analisis *Value for money* dalam evaluasi kinerja keuangan diyakini memiliki potensi untuk meningkatkan pertanggungjawaban sektor publik serta memperbaiki prestasi organisasi sektor publik. Terdapat beberapa manfaat yang terkait dengan penerapan konsep *Value for money* dalam lingkungan organisasi sektor publik. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penerapan konsep *value for money* dalam organisasi sektor publik adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik: Konsep *value for money* membantu organisasi sektor publik dalam menyediakan pelayanan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan anggaran, pelayanan dapat diarahkan dengan lebih efektif kepada publik.
- b) Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik: Dengan mengutamakan efisiensi dan dampak positif, organisasi sektor publik dapat memperbaiki mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penghematan biaya dan peningkatan efektivitas akan berdampak pada kualitas pelayanan yang lebih baik.
- c) Menurunkan Biaya Pelayanan Publik: Penggunaan konsep *value for money* membantu mengurangi biaya pelayanan publik karena adanya pengurangan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Penghematan biaya ini dapat dialokasikan kembali untuk meningkatkan layanan atau membiayai program-program lain yang lebih penting.

- d) Alokasi Anggaran Berorientasi pada Kepentingan Publik: Konsep *value for money* mendorong organisasi sektor publik untuk mengalokasikan anggaran berdasarkan kepentingan publik secara keseluruhan, bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu. Ini mendorong transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana publik.
- e) Meningkatkan Kesadaran terhadap Dana Publik: Penerapan konsep *value for money* akan membangkitkan kesadaran lebih tinggi terhadap pengelolaan dana publik. Kesadaran ini menjadi dasar bagi proses akuntabilitas publik yang lebih baik, karena masyarakat akan lebih memperhatikan bagaimana dana publik digunakan dan apakah nilai-nilai yang dihasilkan sepadan dengan pengeluaran.

Dengan demikian, penerapan analisis *value for money* dalam analisis kinerja keuangan memiliki potensi untuk merangsang perubahan positif dalam akuntabilitas dan kinerja sektor publik, serta mengarahkan organisasi ke arah penyediaan pelayanan yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam konteks lingkup penelitian yang sedang dilakukan, penulis merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, khususnya yang berfokus pada evaluasi kinerja pemerintah daerah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Syamsu (2022) yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Sebelum dan Setelah Kebijakan Refocusing Anggaran," menemukan bahwa pada tahun 2019, rasio kemandirian pemerintah Kota Palopo sebesar 16,56%, mengindikasikan tingkat kemandirian yang relatif rendah.

Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 18,84%. Di samping itu, rasio efisiensi juga meningkat dari 100,25% pada tahun 2019 menjadi 109,98% pada tahun 2020, menandakan adanya inefisiensi yang dapat berdampak buruk

pada pemerintah Kota Palopo. Rasio belanja modal juga mengalami kenaikan dari 21,81% pada tahun 2019 menjadi 30,13% pada tahun 2020.

Sangin (2022) juga menjalankan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kantor BPKAD Kota Palopo)." Penelitian ini memanfaatkan analisis regresi linier dan mencatat bahwa penerimaan pendapatan asli daerah di Kantor BPKAD Kota Palopo masih menunjukkan tingkat yang rendah, yang mengisyaratkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Belanja modal yang diterapkan oleh pemerintah daerah BPKAD Kota Palopo masih belum sepenuhnya menghasilkan kontribusi yang memadai terhadap perkembangan pendapatan daerah.

Selanjutnya, Polii dkk. (2020) dalam penelitian berjudul "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Konsep *Value for money*" mendemonstrasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015-2017 sudah mendekati standar ekonomis, efisien, dan efektif, dengan hasil yang berada di kisaran antara 85% hingga 100%.

Agustin (2017) dalam risetnya yang berjudul "Penerapan Konsep *Value for money* dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik" menunjukkan bahwa Laporan Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya secara ekonomis tercermin melalui penggunaan dana anggaran untuk pengadaan barang dan jasa kantor sebesar 91,6%. Dalam aspek efisiensi, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dinilai berhasil dengan pemanfaatan anggaran sekitar 86,45% dari total anggaran yang diberikan. Efektivitas diraih melalui pajak daerah yang berhasil melampaui 100%, mengindikasikan pencapaian efektivitas yang tinggi.

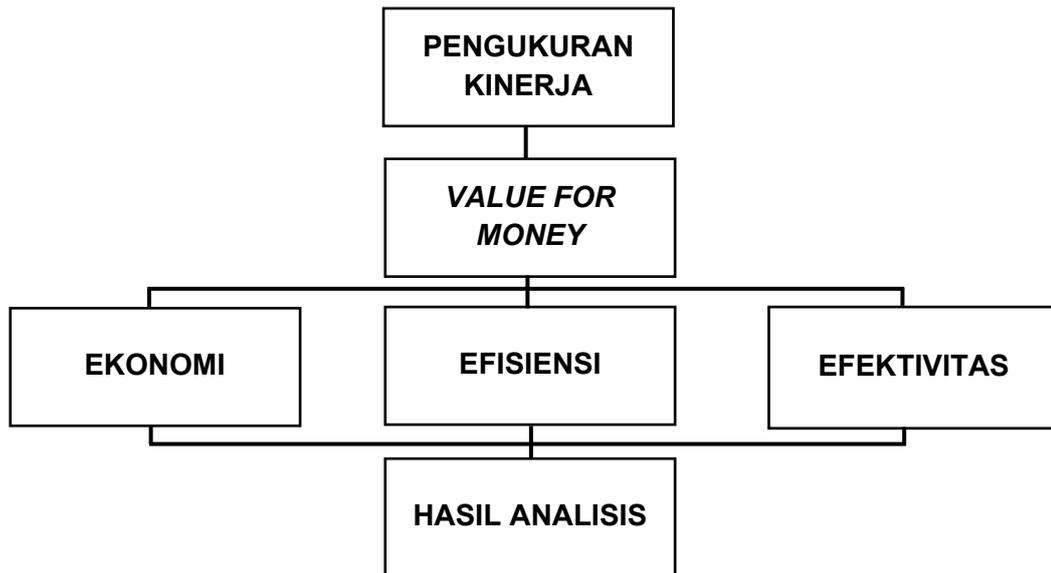
Lestari (2021) dalam penelitiannya berjudul "Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara" menemukan bahwa pendapatan daerah berdampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah di provinsi Sumatera Utara, sementara anggaran belanja memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah di wilayah tersebut.

Penelitian yang dikerjakan oleh Gabriela dkk. (2019) berjudul "Penerapan Pendekatan *Value for money* sebagai Parameter Evaluasi Kinerja Keuangan dalam Organisasi Sektor Publik di Dinas Kesehatan Kota Manado" menganalisis prestasi tiga program di Dinas Kesehatan Kota Manado pada tahun 2018 menggunakan pendekatan *Value for money*. Hasil analisis menemukan bahwa program-program yang berkaitan dengan persediaan kesehatan, pengadaan, pengembangan puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan dinilai berhasil secara ekonomis dan efisien. Akan tetapi, satu program menunjukkan ketidakberhasilan, menyoroti perlunya penekanan pada hasil program serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Value for money adalah salah satu cara pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik. Konsep ini melibatkan tiga elemen utama dalam pengelolaan organisasi sektor publik, yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Untuk mempermudah pemahaman tentang penelitian, berikut model dari kerangka pemikiran.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran